

## Pendidikan nasional Indonesia (1945-1954)

Nurbaity, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20159878&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Pendidikan nasional merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia yang sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka tanggal 17 Agustus 1945, penyelenggaraan pendidikan dikuasai oleh pemerintah jajahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Usaha untuk membenahi pendidikan yang bercorak kolonial dilakukan setelah Indonesia merdeka. Pembenahan dalam bidang pendidikan menuju pendidikan nasional merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri. Proses menuju pembentukan pendidikan nasional harus melewati rintangan-rintangan yang terjadi baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar Indonesia. Rintangan yang terberat adalah ketika Indonesia harus menghadapi kedatangan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Banyaknya sarana pendidikan yang hancur menyebabkan kegiatan belajar mengajar dilakukan di daerah-daerah pedalaman untuk menghindari serangan Belanda. Penyelenggaraan pendidikan ketika itu juga terhambat karena banyaknya pelajar, mahasiswa dan para guru ikut berjuang dalam revolusi fisik (1945--1949) melawan Belanda. Sebuah prestasi luar biasa dalam bidang pendidikan yang tercipta di saat Indonesia sedang berjuang melawan kedatangan kembali Belanda yaitu terbentuknya Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Tahun 1950. Proses pembentukan undang-undang itu memakan banyak waktu dengan perdebatan yang cukup alot. Disini terlihat berbagai kepentingan yang saling beradu antara pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya tokoh-tokoh pendidikan. Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya undang-undang pokok pendidikan ini disahkan pada tahun 1950 dan merupakan undang-undang pendidikan yang pertama. Undang-undang ini dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional. Pada awal terbentuknya tahun 1950, undang-undang ini hanya digunakan di wilayah Republik Indonesia sebagai bagian RIS tetapi pada perkembangan kondisi Indonesia selanjutnya undang-undang ini dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang disahkan dalam parlemen pada tahun 1954.